



STRATEGI PENDIDIKAN NON FORMAL UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PALUH MERBAU

Wiwik Lestari

Email: lestariwiwik201180@gmail.com

Abstract

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan profil masyarakat pesisir dan strategi pendidikan non formal untuk pemberdayaan masyarakat Paluh Merbau. Metode yang digunakan dalam penelitian lapangan ini adalah mixed method yang menggabungkan dua pendekatan sekaligus yakni pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Instrument yang digunakan adalah wawancara dan kuesioner. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan program pemberdayaan melalui berbagai pendidikan non formal masih belum menyentuh keseluruhan permasalahan masyarakat Paluh Merbau sehingga penelitian ini pada akhirnya menyimpulkan bahwa diperlukan wahana berfikir strategis sebagai upaya mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat Paluh Merbau yang mampu menyentuh keseluruhan permasalahan.

Kata-kata kunci: pendidikan, non formal, pemberdayaan, masyarakat.

A. Pendahuluan

Sejarah mencatat bahwa nenek moyang bangsa Indonesia adalah pelaut yang tangguh dan ulung karena telah terbukti pernah menjelajah lautan sampai ke Samudera Hindia. Kesan sebagai masyarakat pelaut ini tidak surut hingga saat ini. Masyarakat pelaut ini kini masih hidup berketurunan dan menciptakan komunitas yang besar di sepanjang pesisir pantai Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki lebih dari 17.000 pulau dengan garis pantai mencapai 81.000 Km. Maka dapat dibayangkan betapa luasnya potensi sumber pendapatan masyarakat dari kawasan pesisir Indonesia.

Peluang melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat di kawasan pesisir sangatlah luas. Tentu saja hal ini harus didukung oleh tidak hanya pemangku kepentingan, tetapi juga masyarakat itu sendiri sebagai objek utama. Sutarto (2018) menjelaskan bahwa pemberdayaan adalah bagian dari paradigma pembangunan yang memfokuskan perhatiannya kepada semua aspek yang prinsipil dari manusia di lingkungannya yakni mulai dari aspek intelektual (Sumber Daya Manusia), aspek material dan fisik, sampai kepada aspek manajerial. Dengan demikian dibutuhkan strategi dalam penerapan program pemberdayaan yang efektif.

Proses pemberdayaan masyarakat berarti kemampuan seseorang untuk memahami dan mengendalikan keadaan sosial ekonomi dan kemampuan politik yang sangat diperlukan dalam upaya memperbaiki kedudukannya di masyarakat, dengan kata lain proses pemberdayaan adalah setiap usaha pendidikan yang bertujuan untuk membangkitkan kesadaran/pengertian dan kepekaan pada warga masyarakat terhadap perkembangan sosial ekonomi, dan/atau politik sehingga pada akhirnya warga masyarakat memiliki kemampuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kedudukannya dalam masyarakat, atau menjadi masyarakat yang berdaya (Hiryanto, 2008). Dengan demikian maka pemberdayaan sangat identik dengan pendidikan, karena aktivitas pendidikan seyogyanya adalah bentuk usaha pemberdayaan manusia yang dilakukan baik secara formal maupun non formal.

Pendidikan non formal adalah salah satu bentuk pemberdayaan manusia. Upaya ini menjadi salah satu cara yang dilakukan di kawasan Paluh Merbau oleh berbagai pihak sejak tahun 2010. Berjarak sekitar 24 Km dari kota Medan, daratan Paluh Merbau secara geografis dipisahkan oleh Sungai Seruwai yang terbagi dan mengalir ke dua arah muara yakni muara dibawah wilayah administratif Kecamatan Medan Labuhan dan Kecamatan Percut Sei Tuan. Waktu tempuh yang tidak lama menyebabkan lokasi ini sangat mudah di akses oleh pendatang dari kota Medan. Jadi sangat mungkin bila saat ini kondisi tersebut menyebabkan masyarakat Paluh Merbau telah banyak menerima berbagai pendidikan dan pelatihan pemberdayaan dari berbagai LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) baik dari dalam maupun luar negeri.

Salah satunya seperti pengalaman yang telah diperoleh Kelompok Tani Hutan Bakti Nyata di Paluh Merbau. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Syamsul selaku Ketua Kelompok menjelaskan bahwa sudah sangat banyak pelatihan-pelatihan yang diperoleh kelompoknya melalui

berbagai lembaga baik dari pemerintah maupun swasta. Mulai dari pembibitan mangrove, reboisasi hutan mangrove, serta pengolahan panganan dari mangrove seperti; selai, sirup, dodol, batik mangrove, hingga keripik jeruju. Kelompok yang beranggotakan seluruhnya dari masyarakat Paluh Merbau ini telah berhasil memproduksi berbagai komoditi khas mangrove. Mereka bahkan telah mengikuti berbagai even atau pameran-pameran baik lokal maupun nasional. Termasuk berbagai pameran produk hutan mangrove yang menggandeng salah satu Perguruan Tinggi Negeri ternama. Namun setelah selama lebih dari 10 tahun ini, masyarakat belum merasakan dampak ekonominya secara signifikan. Bahkan cenderung jalan di tempat.

Masalah ini menjadi perhatian peneliti karena jelas telah terjadi penyimpangan antara yang direncanakan sebagai target keberhasilan pemberdayaan masyarakat dengan kondisi ekonomi masyarakat di Paluh Merbau. Oleh karena itu dibutuhkan analisis yang mendalam terkait situasi ini melalui kegiatan penelitian dengan langkah-langkah komprehensif. Seperti menelusuri sebab ketidakberhasilan tujuan pemberdayaan dan solusi yang ditawarkan untuk dapat mengurai masalah dalam penelitian ini.

Adapun tujuan penelitian ini adalah pertama, untuk mengetahui akar masalah yang menyebabkan tidak tercapainya indikator keberhasilan pemberdayaan masyarakat berupa peningkatan pada taraf hidup ekonomi masyarakat Paluh Merbau, kedua, menawarkan alternatif solusi terhadap masalah yang terjadi saat ini.

B. Metode

Penelitian dilaksanakan di daerah Paluh Merbau Desa Tanjung Rejo Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. Penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi/data melalui wawancara mendalam dan terstruktur selama rentang waktu dua bulan dari 20 responden yang dipilih secara acak (random sampling) dan dianggap representatif yang merupakan anggota Kelompok Tani Hutan Bakti Nyata sekaligus warga Paluh Merbau. Juga mendata antusiasme, sikap, dan reaksi masyarakat terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan yang selama ini telah dilaksanakan di Paluh Merbau melalui kuesioner. Data yang diperoleh dari kedua instrument ini kemudian dianalisis secara sistematis. Lalu hasil analisis digabungkan dengan cara mensintesis yakni menggabungkan kedua hasil analisis ke dalam sebuah struktur konstruksi

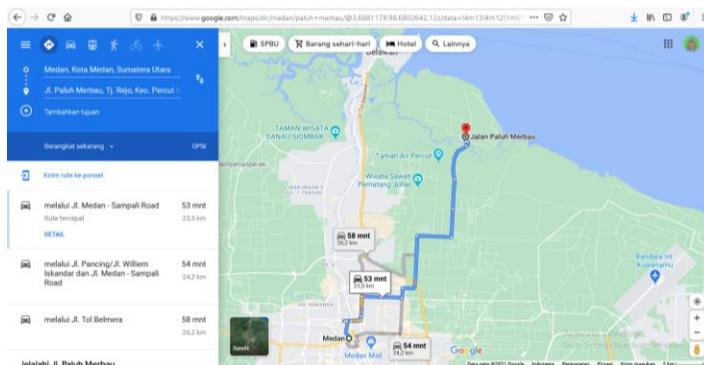
agar menimbulkan interpretasi baru sebagai relasi antar data untuk menjembatani antara masalah penelitian dengan solusi yang disampaikan dalam bentuk analisis deskriptif kualitatif

C. Hasil dan Pembahasan

1. Hasil

A. Kondisi Masyarakat Pesisir Paluh Merbau

Kawasan Paluh Merbau adalah kawasan pesisir yang berada di Pantai Timur Sumatera yang secara administratif terletak di Desa Tanjung Rejo Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang pada 3°43'25,3"LU dan 98°45'51,5"LS.



Sumber:

<https://www.google.com/maps/dir/medan/paluh+merbau/@3.6881179,98.6802642,12z/data=!4m1!3!4m1!2!1m5!1m1!1s0x303131cc1c3eb2fd:0x23d431c8a6908262!2m2!1d98.6722227!2d3.5951956!1m5!1m1!1s0x3036cb623d513c1d:0x48ed993ff4067f8f!2m2!1d98.7497125!2d3.7284547>

Gambar 1. Lokasi Paluh Merbau

Potensi sumber daya alam yang besar di kawasan Paluh Merbau telah menimbulkan berbagai permasalahan antara lain perusakan hutan mangrove, perusakan terumbu karang, abrasi pantai, gelombang pasang *over fishing*, dan bahkan *tsunami*. Kelambanan dalam penanganan kondisi ini di Paluh Merbau baik secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan tingkat ekonomi masyarakatnya yang masih rendah sehingga mempengaruhi kemampuan sumberdaya manusianya. Oleh karena itu tidak ada upaya sendiri dari masyarakat untuk melakukan perbaikan dan penanggulangan hingga tahun 2010.

Dumulai sejak tahun 2010, Paluh Merbau mulai bergeliat. Kedatangan beberapa LSM ke Paluh Merbau dengan berbagai program

pemberdayaan membuat masyarakat termotivasi untuk berubah. Berbagai pendidikan non formal dalam bentuk workshop dilakukan secara intensif. Bentuk-bentuk pelatihan yang dilakukan tidak hanya terkait program reboisasi hutan mangrove tetapi juga pelatihan-pelatihan peningkatan keahlian untuk sektor ekonomi. Beberapa diantaranya yakni pelatihan membuat sirup mangrove, pelatihan membuat selai mangrove, pelatihan membuat dodol mangrove, pelatihan membuat batik mangrove, dan pelatihan membuat keripik jeruju. Bahkan masyarakat Paluh Merbau sampai taraf ini telah mahir dan siap sebagai dapur produksi berbagai produk olahan hutan mangrove non kayu.

B. Pendidikan Non Formal

Prinsip pendidikan non formal

Pendidikan non formal menurut Coombs (Sudjana, 2000) adalah setiap kegiatan yang terorganisasi dan sistematis di luar sistem persekolahan yang mapan, dilakukan secara mandiri atau merupakan bagian penting dari kegiatan yang lebih luas, yang sengaja dilakukan untuk melayani peserta didik tertentu didalam mencapai tujuan belajarnya.

Pendidikan non formal berbasis masyarakat menurut Yunus (2004) terdiri dari lima prinsip dasar, yakni: (1) kepedulian terhadap masalah, kebutuhan dan potensi/sumberdaya masyarakat; (2) kepercayaan timbal balik dari pelayan program dan dari masyarakat pemilik program; (3) fasilitas (pemerintah) dalam membantu kemudahan masyarakat dalam berbagai proses kegiatan; (4) adanya partisipatif, yaitu upaya melibatkan semua komponen lembaga atau individu terutama warga masyarakat dalam proses kegiatan, dan (5) mengayomi peranan masyarakat dan hasil yang dicapai.

Strategi penerapan pendidikan non formal untuk pemberdayaan masyarakat

Agar proses pendidikan non formal untuk pemberdayaan masyarakat berhasil sesuai harapan, maka menurut Yunus (2004) sebaiknya dilakukan melalui pendekatan-pendekatan berikut ini: (1) *need oriented*, yaitu pendekatan yang berorientasi dan didasarkan pada kebutuhan warga masyarakat; (2) *endegenious*, yaitu pendekatan yang berorientasi dan mengutamakan kesesuaian nilai-nilai keaslian lokal, dengan cara menggali dan menggunakan potensi yang dimiliki warga belajar; (3) *self reliant*, yaitu pendekatan yang membangun rasa percaya diri atau sikap mandiri pada setiap warga masyarakat; (4) *ecologically sound*,

yaitu pendekatan yang berorientasi, memperhatikan dan mempertimbangkan aspek perubahan lingkungan; dan (5) *based on structural transformation*, yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan pada perubahan struktur sistem, baik yang menyangkut hubungan sosial, kegiatan ekonomi, penyebaran keuangan, sistem manajemen maupun partisipasi masyarakat setempat.

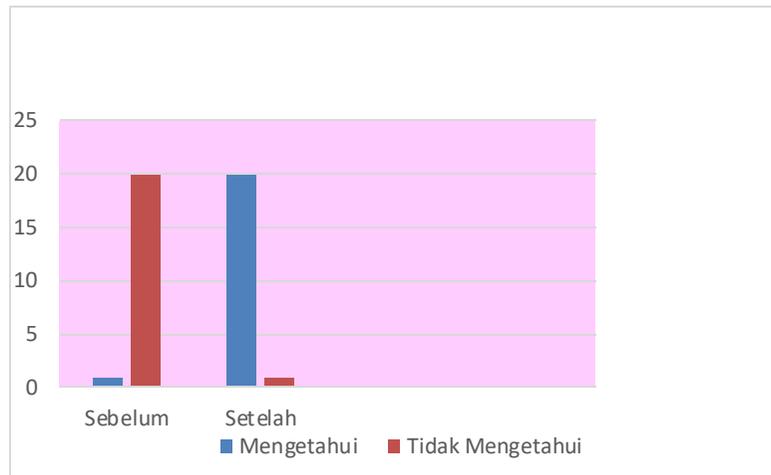
Berdasarkan uraian diatas, maka pendidikan non formal untuk pemberdayaan masyarakat melalui strategi yang tepat akan memberikan kemudahan-kemudahan baik dalam menganalisis, mengembangkan, dan melaksanakan program-program pendidikan non formal yang dibutuhkan warga masyarakat. Artinya pelaksanaan pendidikan non formal untuk pemberdayaan masyarakat dapat menyentuh dan mengangkat warga masyarakat menjadi lebih baik yang ditandai dengan meningkatnya pendapatan (ekonomi), pemahaman, dan kesadaran akan lingkungan sosialnya sehingga masyarakat tersebut mengerti bagaimana memberdayakan dirinya.

C. Aktivitas Pemberdayaan Masyarakat Paluh Merbau

Berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan di Paluh Merbau selalu melibatkan masyarakat disana, terutama anggota Kelompok Tani Hutan Bakti Nyata. Kegiatan yang berlangsung silih berganti sejak tahun 2010 hingga kini menjadi moment yang monumental bagi masyarakat Paluh Merbau. Mereka mendapatkannya secara gratis dan berkelanjutan. Mereka juga dilatih sampai mahir. Adapun indikator pemahaman masyarakat Paluh Merbau pada berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat tersebut ditunjukkan pada Tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1 Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Selama Ini Dilaksanakan di Paluh Merbau (2010-2020)

Tingkat Pemahaman	Persentase (%)	Keterangan
Mengetahui	100	20 responden
Tidak Mengetahui	0	0 responden

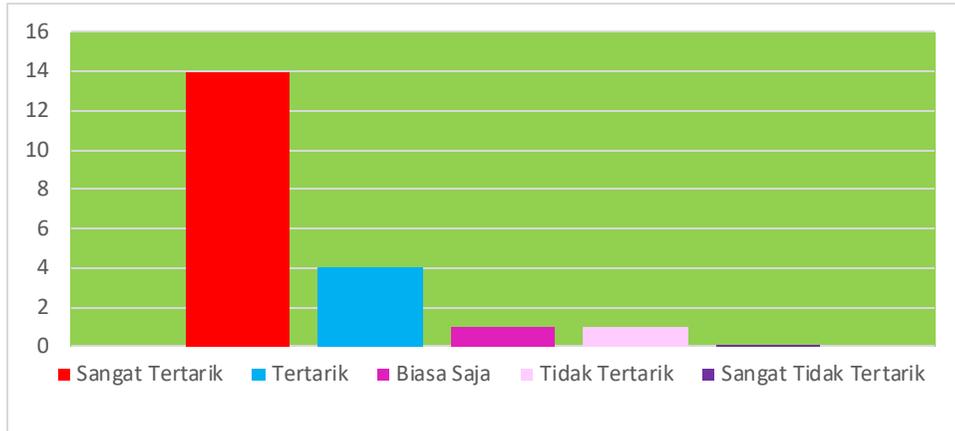


Gambar 1 Grafik Tingkat Pemahaman Masyarakat Pada Pelaksanaan Program Pemberdayaan

Adapun sikap dan reaksi warga Paluh Merbau terhadap keberadaan program pemberdayaan masyarakat diperoleh melalui kuesioner yang diperlihatkan pada Tabel 2 berikut ini:

Tabel 2 Tingkat Reaksi Masyarakat Pada Materi Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Yang Pernah Dilakukan di Paluh Merbau

Reaksi/Sikap	Persentase (%)	Keterangan
Sangat Tertarik	70	14 responden
Tertarik	20	4 responden
Biasa Saja	5	1 responden
Tidak Tertarik	5	1 responden
Sangat Tidak Tertarik	0	0 responden



Gambar 2 Grafik Tingkat Reaksi Masyarakat Pada Materi Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Yang Pernah Dilakukan di Paluh Merbau

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden, diketahui ada beberapa komoditi olahan mangrove yang telah mampu diproduksi masyarakat Paluh Merbau, dapat dilihat pada Tabel 3 berikut ini:

Tabel 3 Kondisi Keberlanjutan Unit Produksi Komoditi Olahan Mangrove di Paluh Merbau

No.	Komoditi Produksi	Berlanjut	Insidental	Tidak Berlanjut
1.	Produksi Selai Mangrove	-	-	√
2.	Produksi Dodol Mangrove	-	-	√
3.	Produksi Sirup Mangrove	-	-	√
4.	Produksi Batik mangrove	-	√	-
5.	Produksi Keripik Jeruju	-	-	√

Masyarakat pesisir menggantungkan pencahariannya dari hasil alam tempat mereka berdomisili. Data hasil wawancara terkait sebaran mata pencaharian masyarakat dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4 Sebaran Mata Pencaharian Masyarakat Paluh Merbau

No.	Jenis Mata Pencaharian	Frekwensi	Proporsi (%)
1.	PNS	4	0,59
2.	Karyawan	41	6,11
3.	Pedagang	24	3,57
4.	Pertanian	395	58,86
5.	Nelayan	72	10,73

6	Buruh Tani	20	2,98
7	Konstruksi	92	13,71
8	Jasa	23	3,42
	Jumlah	671	100

Sumber: Kantor Kepala Desa Tanjung Rejo

2. Pembahasan

A. Evaluasi Pada Pelaksanaan Pendidikan Non Formal Untuk Pemberdayaan Masyarakat Paluh Merbau

Rendahnya kualitas sumber daya manusia di Paluh Merbau yang disebabkan terutama oleh kemiskinan menurut Harahap (2012) merupakan faktor yang menyebabkan permasalahan pada masyarakat pesisir, antara lain: (1) tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, (2) kemiskinan (2) konsumsi yang berlebihan pada penyebaran sumber daya yang tidak merata, (4) kelembagaan, (5) kurangnya pemahaman tentang ekosistem alam, dan (6) kegagalan sistem ekonomi dan kebijakan dalam menilai ekosistem alam. Berdasarkan pendapat tersebut, diketahui bahwa Masyarakat Paluh Merbau merupakan daerah yang sangat potensial kekayaan alamnya. Bahkan jika dikelola dengan baik sangat prospektif untuk dikembangkan. Namun faktor kemiskinan, kurangnya pemahaman terhadap ekosistem alam, dan kelemahan serta kegagalan pada sistem kelembagaan dan ekonomi justru membuat upaya perubahan melalui pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat yang selama ini dilakukan hanya jalan di tempat.

Senada dengan pendapat diatas, menurut Chambers (1997) ada sejumlah bias orang luar yang menyebabkan terjadinya hambatan mereka untuk memahami kemiskinan dan orang miskin akibat latar belakang budaya orang luar itu sendiri, yaitu: (1) bias musim: datang saat musim kemarau/kering atau pasca panen; (2) bias tempat: datang hanya pada lokasi yang mudah dijangkau; (3) bias tokoh: hanya menemui kelompok elit masyarakat; (4) bias gender: hanya berbicara dengan kelompok laki-laki; (5) bias program: menggunakan program untuk pamer kesuksesan; (6) bias kesopanan: kecenderungan untuk menyembunyikan hal buruk dan basa-basi; (7) bias profesi: kecenderungan untuk memahami masyarakat dari aspek yang diminatinya saja (parsial).

Lembaga swadaya masyarakat/praktisi pembangunan adalah sebagai "orang luar" yang bekerja di masyarakat. Orang luar selalu memiliki persepsi dan cara pandang tertentu terhadap masyarakat yang dimasukinya. Orang luar juga memiliki kepentingan dan hanya mau

memberikan sedikit waktu untuk berada di tengah masyarakat. Sehingga orang luar seringkali gagal mengetahui tentang kebutuhan masyarakat marjinal yang paling mendasar. Kelompok ini, mereka hanya sibuk dengan bagaimana melakukan/membantu mengatasi keterbelakangan dan kemiskinan tanpa memikirkan apa dan mengapa keterbelakangan dan kemiskinan itu.

Seperti yang teridentifikasi dari kondisi masyarakat Paluh Merbau, bahwa tujuan dari kegiatan pemberdayaan masyarakat disana telah tidak tercapai sesuai yang diharapkan. Tingginya tingkat pemahaman dan ketertarikan pada pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat menurut grafik pada Gambar 1 & 2 justru berbanding terbalik dengan tingkat aktivitas produksi olahan mangrove masyarakat yang ditunjukkan oleh Tabel 3. Dengan kata lain strategi pendidikan non formal yang selama ini dilakukan untuk pemberdayaan masyarakat Paluh Merbau telah gagal mengangkat/meningkatkan pendapatan/ekonomi masyarakat Paluh Merbau.

B. Penyebab Kegagalan Program Pemberdayaan Masyarakat di Paluh Merbau dan Solusinya

Tidak mengayomi peranan masyarakat dan hasil yang dicapai

Keberhasilan adalah sebuah prestasi yang tidak boleh diabaikan. Keberhasilan selalu datang saat setelah seseorang atau kelompok telah bekerja dengan giat untuk mencapainya. Namun keberhasilan jika tidak mendapat perhatian dan dukungan maka akan kembali runtuh.

Warga masyarakat Paluh Merbau yang telah memiliki keterampilan baik, bahkan mahir, setelah mendapatkan berbagai pelatihan melalui pendidikan non formal untuk pemberdayaan masyarakat membutuhkan pembinaan dan pendampingan yang berkelanjutan hingga mampu mandiri dan berdiri sendiri.

Pencapaian yang telah diperoleh masyarakat ini dapat di buktikan dengan berhasilnya mereka mengolah hasil mangrove dalam rupa selai, sirup, dodol, batik dan keripik. Namun sangat disayangkan pembinaan dan pendampingan yang mereka terima melalui LSM hanya sebatas upaya produksi saja. Mereka sama sekali belum mendapatkan pendidikan dan pelatihan keberlanjutan dari program penyiapan produksi hasil mangrove.

Ada baiknya bila fokus program pemberdayaan juga mengulas materi mengenai bagaimana memasarkan produk, menghitung biaya produksi, menentukan harga, dan menciptakan pasar untuk menyalurkan semua hasil produksi olahan mangrove dari masyarakat.

Tidak berdasarkan kebutuhan warga masyarakat

Tidak adanya pengayom bagi masyarakat terhadap hasil dicapai menunjukkan bahwa program-program pemberdayaan yang selama ini dilakukan masih belum menyentuh keseluruhan permasalahan yang terjadi pada masyarakat Paluh Merbau. Artinya program yang dijalankan tidak dilakukan berdasarkan kebutuhan masyarakat, tetapi hanya merupakan program pemberdayaan masyarakat yang diminati hanya oleh pemilik program.

Untuk menghindari tidak tercapainya tujuan pemberdayaan masyarakat maka tentu saja perspektif seperti ini jangan lagi digunakan sebagai dasar pelaksanaan program. Semua program pemberdayaan harus diputuskan melalui kegiatan observasi mendalam dan analisis yang baik serta objektif. Sehingga berbagai kegiatan yang dilakukan lebih efektif dan efisien.

Hanya menggunakan program untuk pamer kesuksesan

Chambers (1997) melihat selama ini pemberdayaan masyarakat yang dilakukan tidak berdasarkan kebutuhan masyarakat disebabkan oleh minat pelaksana program yang tidak sinkron dengan masalah di lapangan. Sehingga program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan di lapangan lebih mengutamakan perhitungan target waktu, biaya, dan prestise.

Seharusnya untuk menentukan program pemberdayaan masyarakat yang akan diterapkan dan dibutuhkan oleh masyarakat dilakukan melalui sebuah tahapan penelitian yang serius. Sehingga apa pun kegiatan orang luar di masyarakat, pasti akan dilakukan dengan cara-cara yang menguntungkan masyarakat tersebut dan bukan sebaliknya.

Chambers juga menyarankan bahwa perlu dilakukan pembalikan (reversal) yang ditujukan kepada para pemilik program, antara lain meliputi: (1) pembalikan sudut pandang, yaitu dari mengutamakan pengetahuan dan nilai orang luar ke pengetahuan dan nilai masyarakat; (2) pembalikan perlakuan, yaitu dari menjadi masyarakat sebagai objek menjadi fasilitator proses; (3) pembalikan cara kerja, yaitu dari tergesa-gesa, berjarak, dan 'sok tahu', menjadi melebur, duduk bersama, dan mendengarkan, dan mau belajar dari masyarakat. Melalui proses ini diharapkan dapat mendorong masyarakat nantinya berinisiatif mengembangkan dan merencanakan tindakan selanjutnya.

E. Kesimpulan

Pendidikan non formal yang dilakukan untuk pemberdayaan masyarakat harus dilakukan dengan strategi yang tepat. Agar tepat sasaran dan efektif, kegiatan pemberdayaan harus dilakukan tahapan-tahapan penelitian yang mendalam. Evaluasi dan refleksi diperlukan untuk menentukan kebijakan program yang sedang dijalankan. Program pemberdayaan yang dijalankan juga harus menyentuh permasalahan mendasar yang terjadi di masyarakat. Program pemberdayaan yang dilakukan tidak efektif jika semata-mata hanya untuk mengejar prestise. Justru poin pentingnya adalah bagaimana sebuah program pemberdayaan tersebut mampu mendorong terciptanya masyarakat yang mandiri dan berdaya.

F. Daftar Pustaka

- Chambers, R. (1997). *Pembangunan Desa Mulai Dari Belakang*. Jakarta: LP3ES.
- Harahap, R.H. (2012). *Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat yang Berkelanjutan*. Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Hiryanto. (2008). *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendidikan Formal*. Lokakarya Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pendidikan Luar Sekolah 22 November 2008. BAPPEDA Kabupaten Bantul.
- Sudjana, D. (2000). *Pendidikan Luar Sekolah, Wawasan, Sejarah Perkembangan, Falsafah, Teori Pendukung, Asas*. Bandung: Falah Production.
- Sutarto, D. (2018). *Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Berbasis Keluarga Perspektif Gender*. *Jurnal Trias Politika*, Hal. 131-148.
- Yunus, F. (2004). *Pendidikan Berbasis Realitas Sosial-Paulo Freire & YB Mangun Wijaya*. Yogyakarta: Logung Pustaka.